



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.27
BANJARMASIN

BA.PID.R.1.3

a

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 167/Pid.C/2024/PN Bjm

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD HOSIB;**
Tempat lahir : Baliangin;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 7 Pebruari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungkai Simpang Empat Kab. Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

DEVA INDAH, S.H.,M.H.,.....Hakim;

SUYANTI, S.H.,Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam surat
yang diajukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Banjarmasin tertanggal 28 November 2024 Nomor : 173/BAPPPD/XI/2024;

- a. Terdakwa mengakui kebenaran isi berita acara pemeriksaan cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi SATRIA BUDIMAN dan ABDUL WAHAB NAJIR keduanya anggota
Satpol PP Kota Banjarmasin diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai
berikut :
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 20.30
WITA di Jalan Simpang Ulin, Kota Banjarmasin telah menangkap Terdakwa,
karena telah berjualan dibahu jalan di Jalan Trotoar tidak memiliki TDU;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah berjualan pentol di Jalan trotoar
tidak memiliki TDU;
 - Bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin
Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki;
- c. Keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 167/Pid.C/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Simpang Ulin, Kota Banjarmasin telah menangkap Terdakwa, karena telah berjualan dibahu jalan di Jalan Trotoar tidak memiliki TDU;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah berjualan pentol di Jalan trotoar tidak memiliki TDU;
 - Bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki;
- d. Barang bukti dalam perkara ini KTP asli Terdakwa;
- Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MUHAMMAD HOSIB**;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat/ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini satu sama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang bersesuaian dengan uraian dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap pedagang kaki lima sebelum menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan TDU dari Walikota;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja atau badan sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **MUHAMMAD HOSIB** sebagai Terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan cepat / ringan tersebut adalah benar sebagai identitas dia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " Setiap pedagang kaki lima sebelum menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan TDU dari Walikota;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Simpang Ulin, Kota Banjarmasin telah menangkap Terdakwa,

Halaman 2 Putusan Nomor 167/Pid.C/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah berjalan dibahu jalan di Jalan Trotoar tidak memiliki TDU;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah berjalan pentol di Jalan trotoar tidak memiliki TDU;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
- Bahwa Terdakwa tahu kalau berjalan harus memiliki TDU;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang cukup layak dan adil bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HOSIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Berjalan di trotoar tidak memiliki TDU**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.99.000,00 (sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)** dan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. **MUHAMMAD HOSIB** **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 3 Putusan Nomor 167/Pid.C/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp1.000,00 (seribu rupiah)**;

Demikianlah diputus pada hari **Jumat**, tanggal **29 November 2024**, oleh saya **DEVA INDAH, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **SUYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **MASHURI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUYANTI, S.H.

DEVA INDAH, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)